

**KOMUNIKASI IRHAM BUANA NASUTION SELAKU  
WAKIL KETUA II DPRD SUMATERA UTARA  
DALAM MENGUPAYAKAN PENYERAPAN  
ASPIRASI DI BIDANG PENDIDIKAN  
DI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**BETHARI SAFIN SIREGAR**

**208530154**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/25

**KOMUNIKASI IRHAM BUANA NASUTION SELAKU  
WAKIL KETUA II DPRD SUMATERA UTARA  
DALAM MENGUPAYAKAN PENYERAPAN  
ASPIRASI DI BIDANG PENDIDIKAN  
DI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

Oleh:

**BETHARI SAFIN SIREGAR**

208530154

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/25

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Komunikasi Irham Buana Nasution selaku Wakil Ketua II  
DPRD Sumatera Utara dalam Mengupayakan Penyerapan  
Aspirasi di Bidang Pendidikan di Sumatera Utara

Nama : Bethari Safin Siregar

NPM : 208530154

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing



Dr. Selamat Riadi, SE, M.I.Kom

Pembimbing



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bethari Safin Siregar  
NPM : 208530154  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Komunikasi Irham Buana Nasution selaku Wakil Ketua II DPRD Sumatera Utara dalam Mengupayakan Penyerapan Aspirasi di Bidang Pendidikan di Sumatera Utara**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 26 September 2024

Yang menyatakan



Bethari Safin Siregar

NPM 208530154

## ABSTRAK

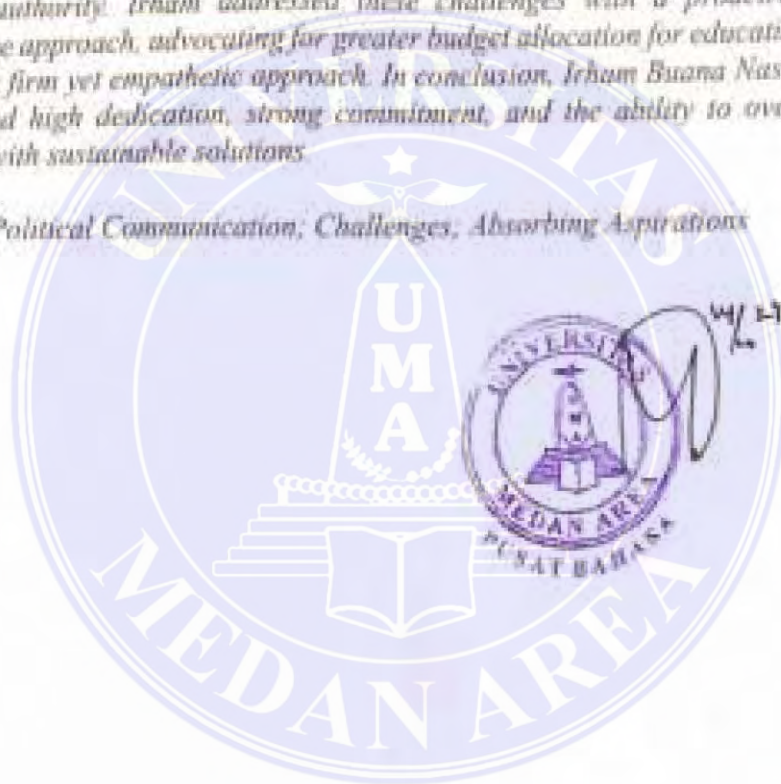
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi dan hambatan Irham Buana Nasution dalam menyerap aspirasi masyarakat di bidang pendidikan di Sumatera Utara pada tahun 2023. Sebagai Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sumatera Utara, Irham memiliki peran penting dalam memfasilitasi interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Irham secara aktif terlibat dalam kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Melalui kunjungan lapangan, partisipasi dalam reses, dan pertemuan rutin dengan pemangku kepentingan, ia mampu menyerap aspirasi masyarakat dan mengintegrasikannya dalam agenda legislatif. Hambatan yang dihadapi termasuk kompleksitas aspirasi yang beragam, keterbatasan sumber daya, anggaran yang terbatas, dan kewenangan legislatif yang terbatas. Irham mengatasi hambatan ini dengan pendekatan proaktif dan kolaboratif, memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan serta menggunakan pendekatan yang tegas namun empatik. Kesimpulannya, peran Irham Buana Nasution mencerminkan dedikasi tinggi, komitmen kuat, dan kemampuan mengatasi tantangan dengan solusi berkelanjutan.

**Kata Kunci: Komunikasi Politik; hambatan; menyerap aspirasi**

## ABSTRACT

*This research aimed to understand the communication and challenges faced by Irham Buana Nasution in absorbing public aspirations in the field of education in North Sumatra in 2023. As the Second Deputy Chairman of the Regional Legislative Council (DPRD) of North Sumatra Province, Irham played a crucial role in facilitating interaction between the public and the local government. The research method used was descriptive with a qualitative approach, utilizing in-depth interviews, literature reviews, and documentation. The results indicated that Irham was actively involved in activities supporting the improvement of education quality in North Sumatra. Through field visits, participation in recesses, and regular meetings with stakeholders, he was able to absorb public aspirations and integrate them into the legislative agenda. Challenges encountered included the complexity of diverse aspirations, limited resources, constrained budget, and restricted legislative authority. Irham addressed these challenges with a proactive and collaborative approach, advocating for greater budget allocation for education and employing a firm yet empathetic approach. In conclusion, Irham Buana Nasution's role reflected high dedication, strong commitment, and the ability to overcome challenges with sustainable solutions.*

**Keywords:** Political Communication, Challenges, Absorbing Aspirations

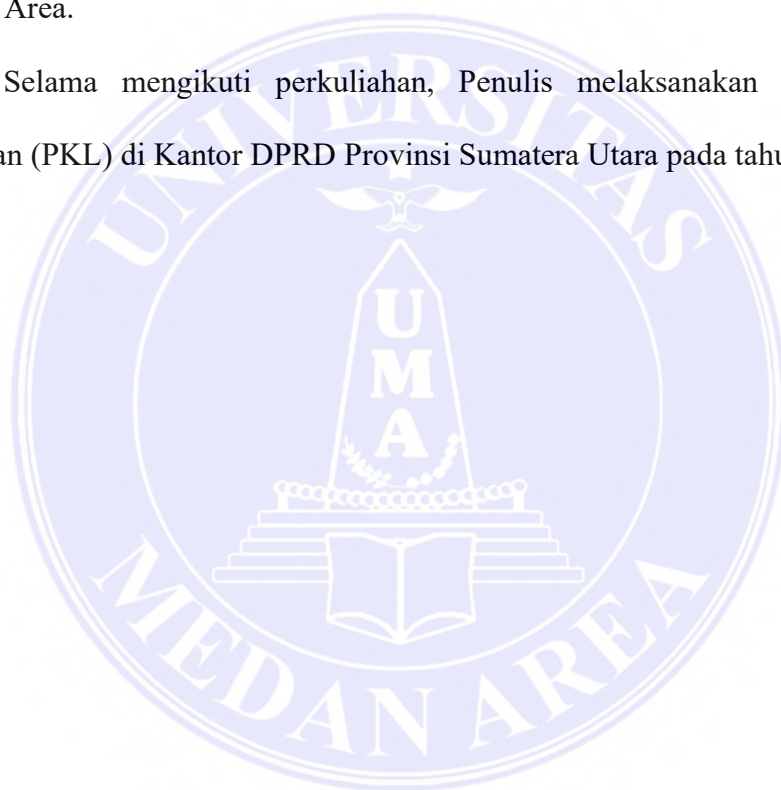


## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 30 Januari 2003 dari Bapak M. Arifin Siregar dan Ibu Diana Safitri. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara.

Tahun 2020 Penulis lulus dari SMA Swasta Al-azhar Medan dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023.





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Komunikasi Politik dengan judul Komunikasi Irham Buana Nasution selaku Wakil Ketua II DPRD Sumatera Utara dalam Mengupayakan Penyerapan Aspirasi di Bidang Pendidikan di Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan berupa saran, kritik, bimbingan dan doa kepada penulis. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos, MAP selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Selamat Riadi, SE, M.I.Kom selaku dosen pembimbing saya yang telah membina dan membimbing saya dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Rehia K. Isabela Barus, S.sos M.SP selaku Sekretaris
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, terkhusus Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi.
7. Seluruh Staff dan Pegawai Universitas Medan Area
8. Teristimewa kepada orang tua terkasih, Bapak M. Arifin Siregar dan Ibu Diana Safitri serta Abang penulis M. Alfa Attala Safin Siregar dan Adik penulis Alm. M. Gamma Lavinza Safin Siregar yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan cinta kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini
9. Sahabat-sahabat saya Azzahra, Khairunisa Setia Bintang, yang telah menghibur dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi
10. Teman seperjuangan Penulis semasa perkuliahan hingga penyusunan skripsi Sellina Putri Amanda, Fazril Taufik Hidayat dan khususnya Ryan Fitrah

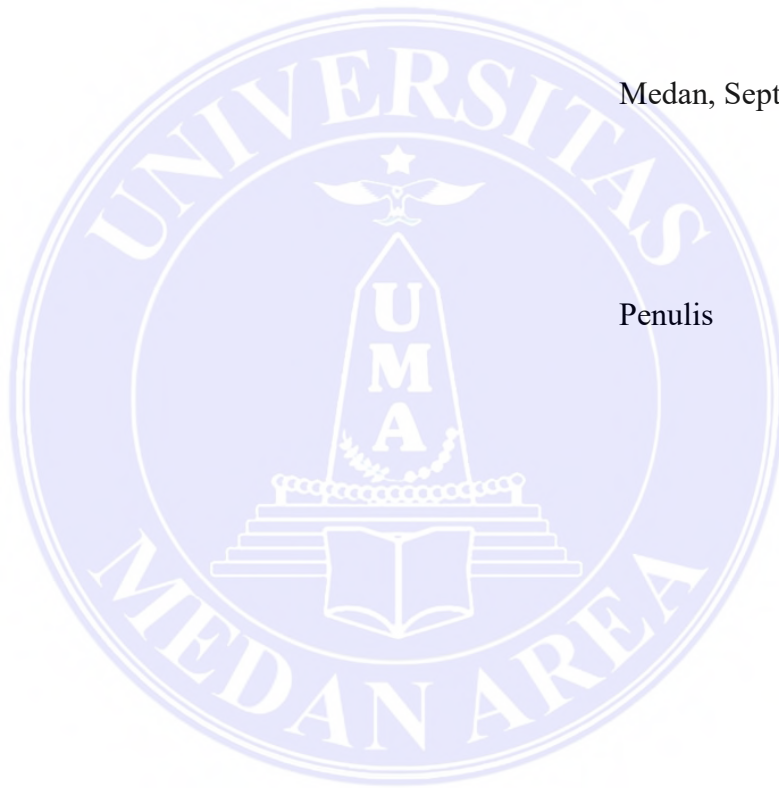
Dhani dan Benny Ferdinand Manurung yang telah memberikan bantuan untuk penyusunan skripsi ini

11. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, September 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Komunikasi.....	10
2.1.2 Komunikasi Interpersonal .....	12
2.1.3 Gaya Komunikasi .....	14
2.1.4 Komunikasi Politik.....	16
2.1.5 Peran Legislatif.....	18
2.1.6 Penyerapan Aspirasi .....	21
2.1.7 Pendidikan .....	26
2.1.8 Profil Irham Buana Nasution.....	32
2.2 Kerangka Berpikir .....	34
2.3 Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	40
3.1 Metode Penelitian.....	40
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	41
3.2.2 Waktu Penelitian .....	41
3.3 Sumber Data.....	42
3.3.1 Data Primer.....	43
3.3.2 Data Sekunder .....	43
3.4 Informan Penelitian.....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Teknik Analisis Data.....	49

3.7	Keabsahan Data.....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>52</b>
4.1	Profil Lengkap Irham Buana Nasution .....	52
4.1.1	Biografi.....	52
4.1.2	Pendidikan .....	52
4.1.3	Kursus/Diklat.....	53
4.1.4	Riwayat Organisasi.....	53
4.1.5	Jabatan .....	53
4.1.6	Alamat Kantor .....	53
4.2	Hasil Penelitian .....	54
4.2.1	Komunikasi Irham Buana Nasution dalam Mengupayakan Penyerapan Aspirasi di Bidang Pendidikan di Sumatera Utara .....	54
4.2.2	Hambatan Irham Buana Nasution dalam Mengupayakan Penyerapan Aspirasi di Bidang Pendidikan di Sumatera Utara.....	70
4.3	Pembahasan.....	75
4.3.1	Komunikasi Irham Buana Nasution dalam Mengupayakan Penyerapan Aspirasi .....	75
4.3.2	Hambatan Irham Buana Nasution .....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>81</b>
5.1	Kesimpulan .....	81
5.2	Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>83</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>		<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	36
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	41



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Panduan Wawancara.....	86
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan .....	88
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset.....	89
Lampiran 4 Surat Izin Melaksanakan Penelitian .....	90



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Badan legislatif merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab penting dalam membuat undang-undang serta mengawasi pelaksanaannya setelah mendapatkan persetujuan. Di Indonesia, struktur Dewan Legislatif terdiri dari dua badan utama: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah badan legislatif yang anggotanya terdiri dari pejabat pemerintah daerah yang dipilih dari setiap provinsi di Indonesia, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdiri dari warga sipil yang dipilih melalui proses pemilihan umum.

Di tingkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat strategis dalam pemerintahan. DPRD memegang tiga peranan utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam hal anggaran, DPRD terlibat dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan pemerintah daerah. APBD ini merupakan alat penting yang digunakan untuk mewujudkan fungsi penganggaran, yang esensial dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah (Azahra & Lubis, 2021).

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD juga sangat vital. Pengawasan ini merupakan fungsi manajemen yang krusial, yang bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah. Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan berbagai tujuan pembangunan dapat tercapai dengan lebih baik (Haryati, 2010). Salah satu tugas utama DPRD dalam



penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah melaksanakan fungsi pengawasan ini, yang bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah (Anam & Anwar, 2020).

Memahami peran DPRD yang sangat penting ini, menimbulkan harapan besar dari masyarakat agar para wakil rakyat yang terpilih dapat mengungkapkan aspirasi dan harapan masyarakat, menjalankan tanggung jawab, dan kemampuannya untuk memastikan bahwa proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik. Salah satu tanda kemajuan yang diharapkan adalah perbaikan dalam bidang pendidikan. Bagaimana memahami masalah-masalah tersebut dapat membantu DPRD, pemerintah daerah, dan pihak lain yang ingin menerapkan tata kelola yang baik, terutama dalam meningkatkan kemampuan DPRD dalam mencapai pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara (Rahmah & Marliyah, 2021).

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur Alat Kelengkapan DPRD (AKD) di tingkat provinsi terdiri dari beberapa komponen penting yang berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi legislatif. Komponen-komponen tersebut meliputi:

1. Pimpinan

Pimpinan DPRD merupakan puncak dari struktur organisasi yang bertugas memimpin dan mengoordinasikan kegiatan DPRD.

2. Badan Musyawarah (Bamus)

Badan ini bertugas mengatur dan merencanakan kegiatan-kegiatan DPRD, termasuk jadwal sidang dan agenda kerja.

3. Komisi

Komisi-komisi ini dibentuk sesuai dengan bidang-bidang tertentu untuk membahas dan menangani masalah-masalah spesifik yang berkaitan dengan bidang tersebut.

4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Badan ini bertugas menyusun dan mengkaji rancangan peraturan daerah sebelum diajukan untuk disahkan.

5. Badan Anggaran (Banggar)

Badan ini bertugas dalam penyusunan, pembahasan, dan pengawasan anggaran daerah.

6. Badan Kehormatan (BK)

Badan ini bertanggung jawab menjaga integritas dan etika anggota DPRD serta menegakkan disiplin.

7. Alat Kelengkapan Lain

Alat kelengkapan ini dapat dibentuk melalui keputusan Rapat Paripurna sesuai dengan kebutuhan.

Menurut ketentuan perundang-undangan, jumlah komisi yang dapat dibentuk dalam DPRD Provinsi tergantung pada jumlah anggotanya. DPRD Provinsi yang memiliki anggota antara 35 hingga 55 orang dapat membentuk hingga empat komisi, sedangkan DPRD Provinsi dengan lebih dari 55 anggota dapat membentuk hingga lima komisi.

DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki lima komisi yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang tertentu, sebagai berikut:

1. Komisi A Bidang Pemerintahan: Komisi ini menangani urusan pemerintahan, politik, dan hukum.
2. Komisi B Bidang Perekonomian: Komisi ini fokus pada masalah ekonomi, perdagangan, industri, dan ketenagakerjaan.
3. Komisi C Bidang Keuangan: Komisi ini bertugas dalam pengelolaan keuangan dan perbankan.
4. Komisi D Bidang Pembangunan: Komisi ini mengurus bidang infrastruktur, transportasi, dan pembangunan daerah.
5. Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat: Komisi ini menangani isu-isu terkait kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.

Dalam bidang pendidikan, Komisi yang terkait adalah Komisi E, yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Komisi E melakukan kegiatan dan tugas sehari-hari dalam bidang kesejahteraan rakyat yang mencakup pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, pemuda, agama, sosial, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mobilitas penduduk, dan pendidikan (Herlin, 2022).

Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling penting yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Peran vital pendidikan dalam membangun negara yang lebih maju dan sejahtera diakui dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 29 beserta amandemennya. Pendidikan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban seluruh warga negara untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

Meskipun demikian, hingga saat ini, pelaksanaan tugas negara dalam bidang pendidikan belum sepenuhnya dapat diwujudkan sesuai dengan harapan. Berbagai tantangan masih menghambat pencapaian standar pendidikan yang diinginkan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan menetapkan target anggaran sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2009. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk sektor pendidikan (Asiah, 2023).

Namun, kendati ada alokasi anggaran yang signifikan, masalah implementasi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut masih menjadi isu yang perlu diselesaikan. Banyak daerah di Indonesia masih mengalami kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang memadai dan tenaga pendidik yang berkualitas masih menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Upaya peningkatan kualitas pendidikan memerlukan sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

Secara keseluruhan, pendidikan di Indonesia masih dalam proses panjang menuju perbaikan dan pengembangan yang optimal. Diperlukan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan dari semua elemen masyarakat untuk memastikan bahwa pendidikan dapat benar-benar menjadi alat yang efektif dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dengan kerja sama yang baik dan komitmen yang kuat, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

DPRD berperan dalam membantu memfasilitasi sekolah-sekolah yang kurang memadai di Provinsi Sumatera Utara. Dalam menerima berbagai keluhan dari

masyarakat, diadakan kegiatan politik yaitu reses yang merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada dewan perwakilan. Aspirasi ini berkenaan erat dengan persoalan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat baik di bidang pembangunan, perekonomian, pemerintahan, dan lain-lain (Sari, et al., 2024)

Reses adalah masa di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kegiatan di luar masa sidang dan di luar gedung parlemen. Masa reses ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan memperoleh aspirasi serta masukan dari konstituen. Reses dilakukan dalam rangka menjalankan tiga fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam Reses Partisipatif, anggota DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau Daerah Pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Masa reses ini sangat efektif dalam memperoleh aspirasi dan masukan dari konstituen, serta dalam melihat langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh eksekutif (Isril, et al., 2022)

Dituturkan langsung oleh staf ahli DPRD Sumatera Utara, dalam menjalankan kegiatan reses terlihat bahwa masyarakat banyak yang mengeluh mengenai pendidikan yang kurang memadai di Sumatera Utara. Keluhan tersebut dapat berupa permohonan beasiswa, dukungan fasilitas, maupun bantuan dana untuk pengajian guru. Setelah penyaringan aspirasi dari masyarakat, maka keluhan tersebut ditindaklanjuti dengan komunikasi politik dan kewenangan legislatif.

Dalam menjalankan tugasnya, DPRD Sumut memiliki wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan

Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) yang mengaturnya. Salah satu tujuan DPRD Sumut adalah untuk mewakili rakyat dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam upaya mewakili rakyat, DPRD Sumut harus mampu mengupayakan penyerapan aspirasi masyarakat, termasuk dalam bidang Pendidikan.

Irham Buana Nasution, sebagai Wakil Ketua II DPRD Sumut, telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Menurut data reses, pada tahun 2023, DPRD Sumut telah mengunjungi lebih dari 500 sekolah, baik formal maupun informal, yang ada di Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, Irham Buana Nasution ikut serta dalam kurang lebih 100 kunjungan. Beberapa sekolah yang dikunjungi oleh Irham Buana Nasution antara lain MTs Al Washliyah Petatal di Kabupaten Batubara, SMA Swasta Islam Azizi di Kota Medan, dan SD Amaliyah Desa Tanjung Gusta di Deli Serdang.

Melalui kunjungan-kunjungan ini, Irham Buana Nasution dapat lebih baik memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan, sehingga mampu mewakili rakyat dengan lebih efektif. Kerja nyata Irham Buana Nasution dalam penyerapan dan pelaksanaan aspirasi masyarakat juga terlihat dari berbagai inisiatif yang telah direalisasikan, seperti pengadaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas fasilitas belajar mengajar, serta pemberian bantuan beasiswa kepada siswa berprestasi maupun yang kurang mampu. Selain itu, beliau juga aktif dalam mengadvokasi peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan lainnya, serta memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan di Sumatera Utara. Inisiatif-inisiatif tersebut telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan pendidikan di daerah ini, mencerminkan

komitmen Irham Buana Nasution terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti komunikasi Irham Buana Nasution dalam upayanya menyerap aspirasi masyarakat di bidang Pendidikan di Sumatera Utara pada tahun 2023.

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Irham Buana Nasution menggunakan komunikasi efektif dalam mendengarkan aspirasi pihak sekolah dan bagaimana ia memanfaatkan informasi tersebut untuk mewakili rakyat dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan mengenai bagaimana DPRD Sumut dapat lebih baik mewakili rakyat dalam bidang pendidikan melalui komunikasi yang efektif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah komunikasi Irham Buana Nasution selaku Wakil Ketua II DPRD Sumatera Utara dalam mengupayakan penyerapan aspirasi di bidang pendidikan di Sumatera Utara pada tahun 2023?
2. Bagaimana hambatan yang dialami oleh Irham Buana Nasution selaku Wakil Ketua II DPRD Sumatera Utara dalam mengupayakan penyerapan aspirasi di bidang pendidikan di Sumatera Utara pada tahun 2023?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui komunikasi Irham Buana Nasution selaku Wakil Ketua II DPRD Sumatera Utara dalam mengupayakan penyerapan aspirasi di bidang pendidikan di Sumatera Utara pada tahun 2023.
2. Mengetahui hambatan yang dialami oleh Irham Buana Nasution selaku Wakil Ketua II DPRD Sumatera Utara dalam mengupayakan penyerapan aspirasi di bidang pendidikan di Sumatera Utara pada tahun 2023.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai komunikasi politik, khususnya dalam konteks penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota legislatif.

##### 2. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang tertarik pada bidang komunikasi politik, kebijakan publik, dan pemerintahan daerah.

##### 3. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh DPRD Sumut untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Komunikasi**

Komunikasi adalah proses di mana orang bertukar informasi menggunakan sistem simbol, tanda, atau perilaku yang umum. Penerjemahan dan penafsiran pesan dilakukan setelah pengirim mengirimkannya kepada penerima (Ntara et al., 2023). Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti visual, tertulis, verbal, atau nonverbal. Untuk berkomunikasi dengan baik, orang harus menggunakan bahasa yang sama, memahami satu sama lain, dan berada dalam konteks budaya yang sama. Beberapa komponen proses komunikasi termasuk sumber, pesan, saluran, penerima, umpan balik, lingkungan, konteks, dan gangguan. Komunikasi sangat penting untuk kerja sama, komunikasi, dan perkembangan masyarakat (Gordon, 2024). Faktor-faktor seperti perasaan, keadaan budaya, dan media yang digunakan dapat memengaruhi proses komunikasi yang kompleks dan dinamis.

Teori komunikasi adalah alat untuk memahami dan menganalisis proses komunikasi antara individu, kelompok, atau massa secara sistematis. Berikut adalah beberapa teori komunikasi yang penting:

1. Teori Komunikasi Informatif (Claude Shannon dan Warren Weaver)

Teori ini menggambarkan komunikasi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan menggunakan model sinyal-pesan-penerima. Shannon dan Weaver memperkenalkan konsep keterkaitan antara kemungkinan

kesalahan, penerimaan, dan pesan untuk memastikan pesan diterima dengan akurasi tinggi.

2. Teori Komunikasi Interpersonal (Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas, Don D. Jackson)

Teori ini menggambarkan komunikasi langsung antara individu, mencakup konsep seperti kemampuan komunikasi, memahami, dan menyampaikan pesan. Teori ini membantu memahami bagaimana komunikasi antar individu dapat mempengaruhi hubungan mereka.

3. Teori Komunikasi Kelompok (Bales, Stogdill, Mott, Roe, Thibaut, Kelley)

Teori ini menggambarkan komunikasi antara anggota kelompok, membahas konsep seperti struktur kelompok, komunikasi dalam kelompok, dan peran anggota. Teori ini membantu memahami bagaimana komunikasi dalam kelompok dapat mempengaruhi efektivitas dan kesuksesan kelompok.

4. Teori Komunikasi Organisasi (Bernard Berelson, Wilbur Schramm, Lazarsfeld, Katz, Blumer)

Teori ini menggambarkan komunikasi dalam organisasi, membahas konsep seperti struktur organisasi, komunikasi dalam organisasi, dan peran komunikasi dalam mencapai tujuan organisasi. Teori ini membantu memahami bagaimana komunikasi dalam organisasi dapat mempengaruhi efektivitas dan kesuksesan organisasi.

5. Teori Komunikasi Massa (Daniel Lerner, Wilbur Schramm, Paul F. Lazarsfeld, Harold D. Lasswell)

Teori ini menggambarkan komunikasi dari sumber ke banyak penerima secara meluas, membahas konsep seperti media komunikasi, pengaruh media, dan peran komunikasi dalam membentuk pendekatan dan pemikiran penerima. Teori ini membantu memahami bagaimana komunikasi massa dapat mempengaruhi pendekatan dan pemikiran penerima.

### 2.1.2 Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah berbagi informasi, ide, pendapat, dan perasaan antara dua orang. Dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Mulyana, 2019), menyatakan bahwa komunikasi interpersonal didefinisikan sebagai jenis komunikasi diam-diam yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain secara diam-diam, nonverbal atau vokal. Menurut Irwin Altman dan Dalmas Taylor dalam Nurdin (2014) ada sejumlah faktor yang berkontribusi dalam komunikasi interpersonal, yaitu penetrasi sosial dan pengungkapan diri.

Altman dan Taylor (1973) berpendapat, penetrasi sosial merupakan penggambaran proses pembentukan ikatan interpersonal di mana individu bertransisi dari komunikasi yang dangkal ke komunikasi yang lebih intim. Altman dan Taylor mengibaratkan manusia sebagai bawang. Maksudnya adalah pada dasarnya manusia memiliki beberapa lapisan atau lapis kepribadian. Apabila kita mengupas kulit bawang, kita akan menemukan kulit ari yang berbeda. Teori penetrasi sosial juga menjelaskan bahwa perkembangan suatu hubungan melibatkan saling ketergantungan, dan jika suatu hubungan

memburuk, maka kedekatannya pun akan berkurang. Penetrasi sosial melibatkan konsep "teori bawang" yang menggambarkan manusia memiliki lapisan kepribadian yang berbeda pada tingkat kedekatan dengan individu lain. Lapisan luar merupakan tahap awal orientasi yang berfungsi sebagai pintu gerbang pertukaran informasi antar individu. Pada tahap ini, individu mulai membuka diri, tetapi tetap bersifat umum dan mudah diakses oleh semua orang.

Selain itu, lapisan kedua bersifat semi-pribadi dan hanya tersedia bagi mereka yang dekat dengan orang tersebut dan sering berinteraksi dengannya, seperti teman dan sekelompok kecil orang. Lapisan paling dalam, atau lapisan terakhir, terdiri dari kekhawatiran yang belum terpecahkan, harga diri, dan konsep diri. Wilayah-wilayah yang disebutkan di atas menunjukkan atribut-atribut unik yang tidak mudah dilihat dari sudut pandang eksternal. Lapisan ini sangat sulit untuk diakses dan berfungsi sebagai titik fokus untuk peristiwa emosional.

Komunikasi interpersonal mengacu pada transmisi pesan kepada seseorang, dimana pesan tersebut menimbulkan respon dan memfasilitasi umpan balik secara langsung (Aw, 2011). Menurut DeVito (1992), individu yang memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang kuat menunjukkan kualitas tertentu, seperti keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap yang baik, dan komitmen terhadap kesetaraan dalam berinteraksi.

Komunikasi interpersonal tatap muka membantu meminimalisir kesalahan komunikasi saat dikirim ataupun diterima. Komunikasi interpersonal memiliki kekuatan paling besar untuk mengubah sikap, keinginan, kepercayaan, dan perilaku komunikasi jika dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya.

### 2.1.3 Gaya Komunikasi

Gaya komunikasi mengacu pada berbagai cara yang berbeda di mana orang melakukan pendekatan terhadap proses komunikasi, termasuk menyampaikan dan menerima ide dan pendapat. Gaya-gaya ini dapat dikategorikan berdasarkan cara yang lebih disukai individu dalam mengekspresikan pikiran, ide, dan emosi. Ada berbagai teori dan model yang membantu memahami dan mengidentifikasi gaya komunikasi yang berbeda, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri (Sinaga, et al., 2023).

1. Gaya Komunikasi Bourne:
  - a. Penurut: Menghindari konflik dan mungkin tidak mengekspresikan kebutuhan mereka sendiri.
  - b. Agresif: Menegaskan kebutuhan mereka tanpa mempertimbangkan orang lain.
  - c. Pasif-Agresif: Mengekspresikan emosi negatif secara tidak langsung.
  - d. Manipulatif: Menggunakan taktik untuk memengaruhi orang lain tanpa komunikasi langsung.
  - e. Asertif: Mengkomunikasikan kebutuhan sambil menghormati pikiran dan perasaan orang lain.
2. Gaya Komunikasi Alessandra & Hunsaker:
  - a. Relator: Fokus pada membangun hubungan dan empati.
  - b. Sosialis: Memprioritaskan interaksi sosial dan jaringan.
  - c. Pemikir: Menekankan analisis dan pengambilan keputusan yang logis.

- d. Direktur: Fokus pada kontrol dan efisiensi
3. Gaya Komunikasi Murphy:
  - a. Analitis: Berfokus pada detail dan data.
  - b. Intuitif: Mempercayai naluri dan firasat.
  - c. Fungsional: Memprioritaskan efisiensi dan kepraktisan.
  - d. Personal: Menekankan hubungan emosional dan empati.
4. Gaya Komunikasi Cox:
  - a. Berorientasi pada tindakan: Berfokus pada pengambilan tindakan segera.
  - b. Berorientasi pada proses: Menitikberatkan pada mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
  - c. Berorientasi pada orang: Memprioritaskan membangun hubungan dan empati.
  - d. Berorientasi pada Ide: Berfokus pada menghasilkan dan mengeksplorasi ide-ide baru.
5. Gaya Komunikasi Dias:
  - a. Pengungkap: Berkomunikasi secara terbuka dan langsung.
  - b. Driver: Berfokus pada pencapaian tujuan dan tenggat waktu.
  - c. Relator: Memprioritaskan membangun hubungan dan empati.
  - d. Analitis: Berfokus pada analisis dan pengambilan keputusan yang logis

Gaya komunikasi bersifat dinamis dan dapat bervariasi tergantung pada konteks, hubungan, dan tujuan interaksi. Memahami gaya komunikasi yang berbeda sangat penting untuk komunikasi yang efektif, resolusi konflik, dan

membangun hubungan yang sukses. Setiap gaya memiliki kekuatan dan kelemahan, dan kesadaran akan hal ini dapat membantu individu beradaptasi serta meningkatkan pendekatan komunikasi mereka. Faktor-faktor seperti konvensi budaya dan sosial, peran gender, emosi, dan lingkungan memengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan bagaimana pesan tersebut ditafsirkan oleh orang lain. Mengembangkan kecerdasan emosional, termasuk empati, kesadaran diri, keterampilan sosial, pengaturan diri, dan motivasi, dapat secara signifikan meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemahaman tentang berbagai gaya komunikasi (Zahra, et al., 2022).

#### **2.1.4 Komunikasi Politik**

Komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Menurut Mueller (1973), komunikasi politik adalah hasil yang memiliki sifat politik, apabila ditekankan pada hasil. Jika ditekankan pada fungsi dalam sistem politik, maka komunikasi politik adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan di antara sistem-sistem politik. Maswadi Rauf mendefinisikan komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik karena pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan aktivitas komunikator sebagai pelaku kegiatan politik. Astrid S. Soesanto menggambarkan komunikasi politik sebagai komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah

yang dibahas dalam kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya lewat suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga politik.

Komponen utama komunikasi politik meliputi komunikator politik, pesan politik, dan saluran atau media politik. Komunikator politik adalah orang-orang yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik, seperti Presiden, Menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat. Pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun secara terang-terangan, dan berisi politik. Contohnya seperti pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur, dan berita surat kabar mengenai politik. Saluran atau media politik adalah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Contohnya seperti media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dan sebagainya.

Tujuan komunikasi politik adalah untuk memunculkan dampak dari proses komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator terhadap komunikannya. Efek atau dampaknya diharapkan sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. Selain itu, komunikasi politik juga bertujuan untuk mempengaruhi khalayak dengan memberikan stimulus kepada orang lain untuk melakukan kegiatan politik. Dengan demikian, komunikasi politik merupakan suatu proses yang kompleks dan strategis yang melibatkan berbagai aktor dan media untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan.



Namun, komunikasi politik juga dapat mengalami distorsi, yang dapat bersifat teknis, sosial budaya, maupun semantik. Distorsi ini dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi politik. Oleh karena itu, penting bagi komunikator untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar pesan politiknya dapat disampaikan dengan efektif.

Dalam keseluruhan, komunikasi politik merupakan suatu proses yang penting dalam sistem politik untuk mempengaruhi opini publik dan mencapai tujuan politik. Dengan memahami komponen, tujuan, dan hambatan komunikasi politik, kita dapat memahami bagaimana pesan politik disampaikan dan bagaimana opini publik dipengaruhi oleh komunikasi politik.

### **2.1.5 Peran Legislatif**

Untuk memahami peran legislatif di Indonesia, itu tidak hanya melihat bagaimana lembaga itu sendiri bekerja, tetapi juga mencari tahu tentang hal-hal di luar yang dapat memengaruhi kerja mereka. Dalam merangkai narasi kesehatan demokrasi di Indonesia, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk pergeseran dinamika sosial, kemajuan teknologi informasi, dan tantangan global. Dalam proses demokratisasi Indonesia, peran legislatif melakukan beberapa fungsi penting, yang membentuk dasar bagi proses demokrasi yang efektif dan berkelanjutan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel. Mereka melakukan ini

dengan melaksanakan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. DPRD memiliki peran yang signifikan dan dominan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pertama, Peraturan Daerah tentang pola dasar pembangunan dibuat. Selanjutnya, rencana tahunan yang tercantum dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) harus disetujui oleh DPRD. Jika DPRD keberatan, proyek tidak dapat dimasukkan ke APBD. Sebelum membuat APBD, DPRD akan mengunjungi daerah-daerah untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk dibahas dengan kepala daerah. (Rahmatillah & Keban, 2007).

Legislatif dipilih oleh pemilih melalui pemilihan umum (Rahmatillah & Keban, 2007). Mereka mewakili berbagai kelompok dan perspektif masyarakat dalam posisi ini. Dengan cara ini, legislatif memastikan kepentingan rakyat diwakili dan didengar selama proses pengambilan keputusan. Legislatif adalah tempat di mana warga negara dapat terlibat dalam proses politik. Dalam sistem politik demokratis, individu memiliki kemampuan untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan anggota legislatif mereka untuk menyuarakan masalah, meminta bantuan, atau menyampaikan pendapat mereka. Ini memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dalam pembangunan demokrasi. Salah satu prinsip utama sistem demokrasi adalah legislatif sebagai representasi rakyat. Ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif adalah perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk membuat keputusan politik atas nama mereka (Rahmatillah & Keban, 2007).

Berikut merupakan konsep dasar demokrasi yang memiliki beberapa implikasi penting, yaitu:

1. Pemilihan Umum

Dalam sistem demokratis, warga negara memiliki hak untuk memilih anggota legislatif mereka melalui pemilihan umum. Ini adalah mekanisme penting untuk menjamin bahwa kepentingan rakyat dan suara mereka tercermin dalam proses pengambilan keputusan politik.

2. Kepentingan Publik

Mewakili dan memperjuangkan kepentingan publik adalah tugas utama legislatif. Diharapkan bahwa anggota legislatif memahami dan mendengarkan pandangan, kekhawatiran, dan harapan warga negara yang mereka wakili. Mereka harus bertindak untuk membantu masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kelompok atau individu tertentu.

3. Konsultasi dan Partisipasi:

Legislatif juga membantu masyarakat berkonsultasi dan berpartisipasi dalam proses politik. Mereka dapat mendengarkan keinginan rakyat dan memasukkannya ke dalam agenda politik melalui audiensi, debat, dan mekanisme partisipasi publik lainnya.

4. Akuntabilitas:

Legislatif harus bertanggung jawab kepada rakyatnya. Anggota legislatif dapat dihukum dalam pemilihan berikutnya jika mereka tidak memenuhi harapan atau tidak bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Ini adalah metode untuk mempertahankan akuntabilitas dalam struktur demokrasi. Peran legislatif sebagai representasi rakyat sangat penting dalam sebuah negara demokratis yang sehat untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Ini dilakukan

untuk memastikan bahwa warga negara memiliki kontrol atas kekuasaan dan bahwa kebijakan dan undang-undang yang dibuat memenuhi prinsip demokrasi.

### 2.1.6 Penyerapan Aspirasi

Penyerapan aspirasi mengacu pada proses di mana pemerintah dan lembaga-lembaga lain mengumpulkan, mempertimbangkan, dan memasukkan ide, pendapat, dan kebutuhan masyarakat ke dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang mereka layani.

Penjelasan terkait penyerapan aspirasi disampaikan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Sudarmansyah (2013)
  - a. Penyerapan aspirasi harus dilakukan secara efektif dan berorientasi pada output yang akan dihasilkan. Masyarakat ingin aspirasi mereka ditanggapi secara langsung dan segera ditindaklanjuti.
  - b. Anggota dewan harus mampu bersikap objektif terhadap setiap usulan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan.
  - c. Penyerapan aspirasi harus dilakukan dengan memanfaatkan waktu, fasilitas, dan budget yang telah disediakan. Anggota dewan harus mampu berkomunikasi dengan konstituennya dan mengintegrasikan aspirasi masyarakat dalam program kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (As'ari, 2016).

2. Dusseldorp dan Van Staveren (1980):

- a. Penyerapan aspirasi harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan harus lebih dari hanya gagasan dan kepentingan elit belaka.
- b. Aspirasi dilihat dari dua perspektif: aspirasi pada tingkat ide dan aspirasi pada tingkat peran struktural. Aspirasi pada tingkat ide berarti kumpulan ide verbal dari berbagai lapisan masyarakat. Berpartisipasi langsung dalam suatu kegiatan di tingkat peran struktur (Zuhriansyah, 2013).

3. Abdul Wahab dan Solichin (2005):

- a. Penyerapan aspirasi harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan di wilayah. Masyarakat harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.
- b. Sangat penting untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat, terutama kepada ketua RT, untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Ini akan memungkinkan setiap kegiatan Musrenbang menghasilkan usulan yang lebih baik. (Zuhriansyah, 2013).

4. Anderson (1979):

- a. Penyerapan aspirasi harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan harus lebih dari hanya gagasan dan kepentingan elit belaka.
- b. Aspirasi dapat dilihat dalam dua dimensi: aspirasi pada tingkat ide dan aspirasi pada tingkat peran struktural. Aspirasi pada tingkat ide berarti

kumpulan ide verbal dari berbagai lapisan masyarakat. Berpartisipasi langsung dalam suatu kegiatan di tingkat peran struktur (Zuhriansyah, 2013).

5. Dunn (2000):

- a. Penyerapan aspirasi harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan harus lebih dari hanya gagasan dan kepentingan elit belaka.
- b. Aspirasi dilihat dari perspektif ide dan peran struktural. Aspirasi pada tingkat ide berarti kumpulan gagasan verbal dari seluruh masyarakat. Ini adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan di tingkat peran dalam struktur (Zuhriansyah, 2013).

6. Cohen dan Uphoff (1977):

- a. Penyerapan aspirasi harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan harus lebih dari hanya gagasan dan kepentingan elit belaka.
- b. Aspirasi dilihat dari dua perspektif: aspirasi pada tingkat ide dan aspirasi pada tingkat peran struktural. Aspirasi pada tingkat ide berarti kumpulan ide verbal dari berbagai lapisan masyarakat. Berpartisipasi langsung dalam suatu kegiatan di tingkat peran struktur (Zuhriansyah, 2013).

7. Darudono (2002):

- a. Penyerapan aspirasi harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan harus lebih dari hanya gagasan dan kepentingan elit belaka.

- b. Aspirasi dapat dilihat dalam dua dimensi: aspirasi pada tingkat ide dan aspirasi pada tingkat peran struktural. Aspirasi pada tingkat ide berarti kumpulan ide verbal dari berbagai lapisan masyarakat. Berpartisipasi langsung dalam suatu kegiatan di tingkat peran struktur (Zuhriansyah, 2013).

8. Echols (1983):

- a. Penyerapan aspirasi harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan harus lebih dari hanya gagasan dan kepentingan elit belaka.
- b. Aspirasi dilihat dari perspektif ide dan peran struktural. Aspirasi pada tingkat ide berarti kumpulan gagasan verbal dari seluruh masyarakat. Ini adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan di tingkat peran dalam struktur. (Zuhriansyah, 2013).

9. Hurlock (1979):

- a. Penyerapan aspirasi harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan harus lebih dari hanya gagasan dan kepentingan elit belaka.
- b. Aspirasi dapat dilihat dalam dua dimensi: aspirasi pada tingkat ide dan aspirasi pada tingkat peran struktural. Aspirasi pada tingkat ide berarti kumpulan ide verbal dari berbagai lapisan masyarakat. Berpartisipasi langsung dalam suatu kegiatan di tingkat peran struktur (Zuhriansyah, 2013).

10. Poerwadarminta (1976):

- a. Penyerapan aspirasi harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan harus lebih dari hanya gagasan dan kepentingan elit belaka.
- b. Aspirasi dilihat dari perspektif ide dan peran struktural. Aspirasi pada tingkat ide berarti kumpulan gagasan verbal dari seluruh masyarakat. Ini adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan di tingkat peran dalam struktur. (Zuhriansyah, 2013).

Penyerapan aspirasi sangat erat kaitannya dengan konsep partisipasi masyarakat, yang melibatkan keterlibatan aktif warga dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pengajuan tertulis, presentasi lisan, dan demonstrasi. Pemerintah dan lembaga-lembaga lain harus memastikan bahwa bentuk-bentuk partisipasi ini dapat diakses dan inklusif, sehingga memungkinkan semua anggota masyarakat memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan.

Pentingnya menyerap aspirasi masyarakat disoroti oleh fakta bahwa hal ini terkait erat dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam sistem demokrasi, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan agar suara mereka didengar. Partisipasi ini dibangun di atas gagasan kebebasan untuk bersosialisasi dan berbicara serta mengambil bagian secara konstruktif, yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Penyerapan aspirasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dibuat efektif dan responsif terhadap kebutuhan



masyarakat. Ketika warga negara dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, mereka lebih mungkin untuk berinvestasi dalam hasil dan merasa bahwa suara mereka didengar. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah dan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan.

Di Indonesia, penyerapan aspirasi menjadi sangat penting karena komitmen negara terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip Pancasila serta UUD 1945. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta bermartabat, yang hanya dapat dicapai melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Studi yang dilakukan oleh Totok Minto Leksono, Slamet Suhartono, Hufron, dan Syofyan Hadi (2022) menyoroti perlunya pengaturan mengenai hasil penyerapan aspirasi konstituen oleh DPRD untuk dimasukkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Studi ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran untuk memastikan bahwa anggaran tersebut responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat.

### **2.1.7 Pendidikan**

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah syarat esensial dalam proses pendewasaan anak. Menurutnya, pendidikan berarti membimbing dan mengarahkan semua potensi alami yang dimiliki oleh anak-anak. Tujuannya adalah agar mereka dapat berkembang secara optimal sebagai individu dan

sebagai anggota masyarakat, sehingga mereka dapat mencapai tingkat keamanan dan kebahagiaan tertinggi.

Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga upaya untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian anak, termasuk moral, intelektual, dan sosial. Pendidikan harus memperhatikan karakter dan potensi unik setiap anak, membantu mereka menemukan dan mengembangkan kekuatan internal mereka. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang seimbang dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan penghargaan terhadap martabat anak. Pendekatan ini mencakup penghormatan terhadap kebebasan anak dalam belajar dan berkembang, serta memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan minat dan bakat mereka. Pendidikan juga harus memperhatikan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri sekaligus memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

Dengan pendidikan yang holistik dan berpusat pada anak, tujuan akhir adalah tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan yang maksimal. Anak-anak yang dididik dengan cara ini diharapkan mampu menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri dan keterampilan yang memadai, serta mampu berkontribusi secara konstruktif dalam masyarakat. Ini mencerminkan visi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai sarana untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat dan berintegritas tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah Indonesia mengelola sistem pendidikan nasional untuk melaksanakan amanat Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di Indonesia dapat ditempuh melalui berbagai jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur ini dirancang untuk saling melengkapi dan memperkaya pengalaman belajar individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lebih rinci, pendidikan formal mencakup institusi-institusi pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, seperti sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Pendidikan ini diatur oleh kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan biasanya berlangsung dalam lingkungan kelas yang formal.

Pendidikan nonformal, di sisi lain, meliputi berbagai program pendidikan di luar sistem pendidikan formal yang bertujuan untuk melayani kebutuhan belajar masyarakat yang lebih luas. Contohnya termasuk kursus-kursus keterampilan, pelatihan kejuruan, dan program pendidikan masyarakat. Pendidikan nonformal ini sering kali lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, pendidikan informal adalah proses pembelajaran yang berlangsung di luar institusi pendidikan resmi, yang mencakup semua bentuk

pembelajaran yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa termasuk pembelajaran dari keluarga, teman, lingkungan kerja, atau media massa. Pendidikan informal ini tidak terstruktur secara formal tetapi memainkan peran penting dalam pengembangan pribadi dan sosial individu.

Dengan mengintegrasikan ketiga jalur pendidikan ini, sistem pendidikan nasional bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang luas dan beragam bagi seluruh warga negara. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai bentuk pendidikan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah juga berupaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis.

Implementasi yang efektif dari sistem pendidikan nasional ini diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Dengan demikian, pendidikan menjadi alat yang kuat untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga negara.

Nana S. Sukmadinata (1997) mengemukakan empat teori pendidikan yang beragam, yaitu:

#### 1. Pendidikan Klasik

Teori ini berlandaskan pada ide-ide klasik seperti perenialisme, esensialisme, dan eksistensialisme. Pendidikan klasik melihat pendidikan sebagai sarana untuk melestarikan, mentransmisikan, dan memelihara unsur-unsur warisan budaya. Fokus utama dari paradigma ini bukan pada

metode, melainkan pada konten pendidikan itu sendiri. Isi atau bahan ajar berasal dari khazanah pengetahuan yang telah diteliti dan dibuat oleh para ahli, serta disusun secara logis dan sistematis. Pendidikan klasik menekankan pentingnya materi pelajaran yang solid dan mendalam untuk membentuk fondasi intelektual yang kuat.

## 2. Pendidikan Personal

Menurut teori pendidikan personal, setiap anak memiliki potensi khusus yang sudah ada sejak mereka lahir. Pendidikan harus dirancang untuk membantu siswa mewujudkan potensi penuh mereka dengan berfokus pada kebutuhan dan minat mereka. Dalam konteks ini, siswa adalah aktor utama dalam proses pendidikan, sementara pendidik berperan sebagai mentor, motivator, dan pelayan yang mendukung perkembangan siswa. Pendekatan ini menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat individual dan personal, mengakomodasi perbedaan setiap anak dalam cara mereka belajar dan berkembang.

## 3. Pendidikan Teknologi

Pendidikan teknologi memiliki kesamaan dengan pendidikan klasik dalam hal peran pendidikan dalam transmisi informasi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus utamanya yang lebih mengutamakan pembentukan dan penguasaan keterampilan atau kemampuan praktis, bukan semata-mata melestarikan budaya lama. Pendidikan teknologi menekankan pentingnya penerapan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia modern yang terus berkembang.

#### 4. Pendidikan Interaksional

Konsep pendidikan ini didasarkan pada pemikiran bahwa manusia berkembang sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan berkolaborasi dengan satu sama lain. Pendidikan interaksional menempatkan kolaborasi dan koneksi sebagai pusat dari proses pendidikan. Hubungan antara guru dan siswa, serta interaksi antar siswa, menjadi aspek penting dalam teori ini. Pendidikan interaksional menekankan pentingnya dialog, kerja sama, dan interaksi sosial dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan suportif.

Kualitas pendidikan mencerminkan kualitas suatu negara. Jika mutu pendidikan baik, maka kualitas peradaban bangsa tersebut juga akan baik. Namun, salah satu indikator rendahnya mutu pendidikan adalah rendahnya tingkat penyelesaian pendidikan di setiap jenjang. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Sumut pada tahun 2022, pada tahun 2021, sekitar 1,43% siswa tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat SD, 8,65% siswa tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP, dan persentase yang lebih tinggi terdapat di tingkat SMA, yaitu sekitar 27,19%. Grafik tingkat penyelesaian pendidikan di Sumatera Utara menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum menyelesaikan pendidikan mereka pada setiap jenjang.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Beberapa upaya tersebut termasuk pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Guru, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Keguruan, Manajemen Peningkatan Mutu di Sekolah (MPMBS), Permendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan Program Wajib Belajar 9 tahun yang ditargetkan pada semua anak usia 7-15 tahun. Program ini mencakup 6 tahun bersekolah di SD dan 3 tahun di SMP.

Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat, menghasilkan generasi yang lebih cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global.

### **2.1.8 Profil Irham Buana Nasution**

Irham Buana Nasution adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk periode 2019-2024. Ia lahir di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 21 April 1969. Irham memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, dengan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Magister Hukum (M.Hum.) dari Universitas Sumatera Utara, dan gelar Doktor Bidang Hukum (S3) dari universitas yang sama.

Karier organisasional Irham juga sangat impresif. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada periode 1992-1993 dan Bendahara Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada periode 1993-1994. Selain itu, Irham telah

mengikuti berbagai kursus dan pelatihan, termasuk Pendidikan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Pemilihan Umum di Amerika Serikat, yang menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dirinya sebagai seorang politikus.

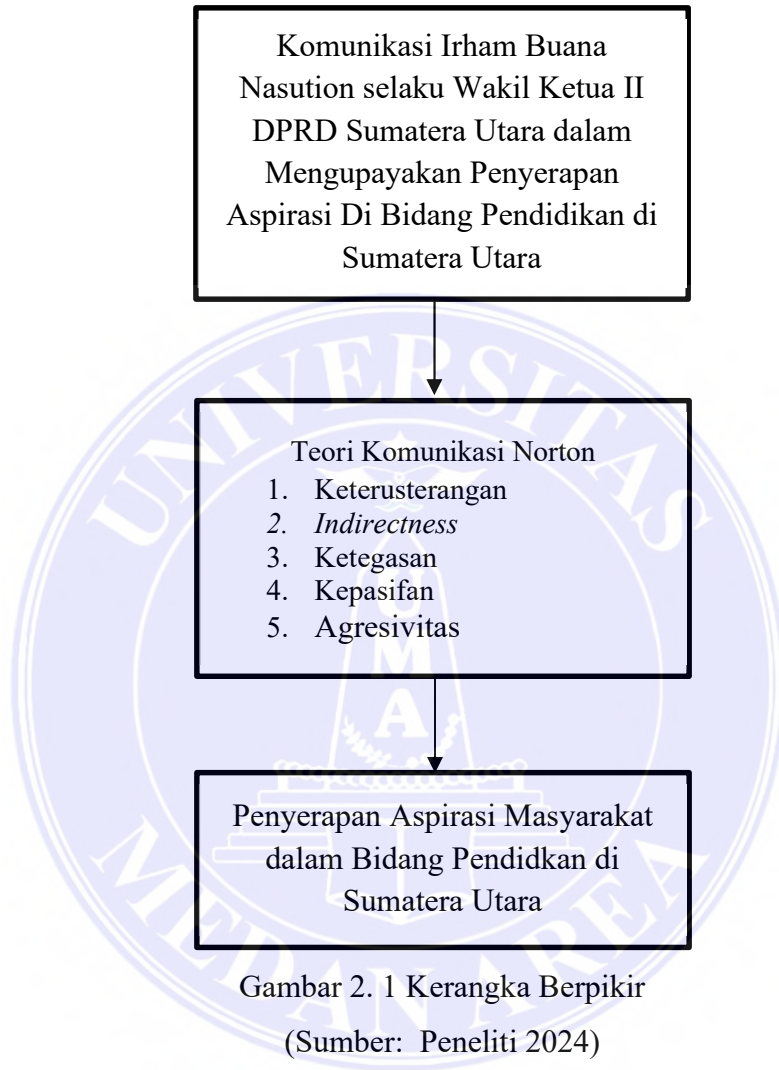
Irham memiliki beberapa prestasi yang signifikan sepanjang kariernya, meskipun detail spesifiknya tidak disebutkan dalam sumber yang tersedia. Sebagai anggota Partai Golkar, Irham telah berhasil mengukuhkan posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut untuk periode 2019-2024. Pada 25 Agustus 2021, Irham resmi diambil sumpah jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Setyawan Hartono, dalam sebuah upacara yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut, Irham memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran di tingkat provinsi. Ia terlibat aktif dalam pembahasan berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Dengan latar belakang akademis dan pengalaman organisasional yang solid, Irham berkomitmen untuk membawa perubahan positif dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di provinsinya.



## 2.2 Kerangka Berpikir

Berikut kerangka berpikir yang peneliti gunakan:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir  
(Sumber: Peneliti 2024)

Dalam Kerangka Berpikir ini, peneliti mendalami bagaimana komunikasi Wakil Ketua II DPRD Sumatera Utara, Irham Buana Nasution, dalam berkomunikasi dalam konteks penerimaan aspirasi yang berguna untuk memajukan pendidikan di Sumatera Utara. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan Teori Komunikasi Norton yang dikembangkan oleh Robert W. Norton pada tahun 1978

yang berfokus pada cara individu berinteraksi secara verbal dan praverbal untuk menyampaikan makna yang dimaksudkan dari pesannya. Menurut Norton, gaya komunikator mengacu pada cara seseorang memberi sinyal tentang bagaimana makna harfiah harus diambil atau ditafsirkan dalam komunikasi.

Norton membagi gaya komunikasi ke dalam dua komponen utama; *Verbal and Paraverbal Interactions* serta *Signaling Literal Meaning*. Sementara untuk dimensi gaya komunikator, Norton membaginya menjadi 5 komponen penting, di antaranya:

1. Keterusterangan: Sejauh mana seorang komunikator menggunakan bahasa yang langsung dan menghindari ambiguitas.
2. Ketidaklangsungan (*Indirectness*): Sejauh mana seorang komunikator menggunakan bahasa yang tidak langsung dan memberikan ruang untuk interpretasi.
3. Ketegasan: Tingkat kepercayaan diri dan ketegasan dalam komunikasi.
4. Kepasifan: Sejauh mana seorang komunikator menghindari mengekspresikan kebutuhan dan pendapat mereka sendiri.
5. Agresivitas: Sejauh mana seorang komunikator menggunakan bahasa yang tegas atau konfrontatif.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Legislatif dan Demokratisasi: Peranan Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Di Indonesia	Satriya Nugraha	2023	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif di Indonesia, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memainkan peran krusial dalam membangun dan memelihara demokrasi di negara ini. Peran mereka mencakup berbagai fungsi yang mendukung perkembangan sistem demokrasi yang kuat dan inklusif. Fungsi-fungsi utama legislatif dalam proses demokratisasi di Indonesia meliputi representasi rakyat, pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap eksekutif, partisipasi publik, pengambilan keputusan bersama, dan pengawasan anggaran. Lembaga legislatif berfungsi sebagai wakil rakyat, memastikan bahwa suara dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat di seluruh Indonesia terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Mereka berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam bentuk kebijakan dan regulasi. Salah satu tugas utama DPR dan DPD adalah merumuskan, membahas, dan mengesahkan undang-undang, yang sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa eksekutif menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup evaluasi kinerja eksekutif, audit anggaran, dan penyelidikan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap bermasalah, penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Mereka juga mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan, memastikan bahwa masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, DPR dan DPD tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pengawas dan fasilitator partisipasi masyarakat, yang

				semuanya berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia.
2.	Peran DPRD terhadap Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dalam Aspek Ekonomi Pembangunan	Dewi Chofifah Rahmah, Marliyah	2021	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah sangat penting, karena mereka memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengelola serta melaksanakan berbagai program pembangunan di wilayah mereka. Pemerintah daerah memegang kunci utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Untuk itu, penting bagi Komisi D untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni, mengingat masih banyak penduduk yang tinggal di kondisi perumahan yang tidak memadai. Dalam konteks ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumatera Utara seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi rumah tidak layak huni dan menyusun data yang lengkap mengenai alamat dan desa di setiap kabupaten/kota. Hal ini penting karena seringkali ditemukan ketidakadilan dan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, yang dapat mengakibatkan program rehabilitasi tidak mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang lebih terencana dan akurat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat dilaksanakan secara efektif dan adil.
3.	Peran Politik Dalam Bidang Pendidikan	Nur Azizah	2021	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tidak sekadar alat dalam politik, melainkan politik itu sendiri adalah bentuk pendidikan yang mengajarkan kita tentang berdemokrasi dan mendorong kita untuk mengemukakan pendapat. Politik, dalam konteks ini, berfungsi sebagai arena pendidikan yang membentuk pemahaman dan keterampilan demokrasi bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat dan beragam di Indonesia, serta membentuk masyarakat yang terdidik dan memiliki perspektif yang luas dalam tatanan pendidikan politik. Dengan demikian, politik dan pendidikan saling berinteraksi untuk memperkuat pemahaman demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat, menciptakan

				lingkungan yang mendukung pembentukan warganegara yang terinformasi dan berdaya.
4.	Peran Lembaga Legislatif dalam Proses Penganggaran Negara di Indonesia	Mei Susanto	2018	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran legislatif di Indonesia dalam proses penganggaran semakin memperkuat fungsinya. Namun, penguatan tersebut belum sepenuhnya terwujud melalui pembentukan struktur bikameral yang efektif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kekuasaan penuh dalam proses penganggaran, termasuk dalam hal pembahasan, peninjauan, perubahan, serta penerimaan atau penolakan usulan anggaran dari eksekutif. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai kamar kedua, hanya diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan, namun sering kali perannya dianggap kurang signifikan karena tidak ada forum khusus yang memadai untuk membahas isu-isu anggaran secara mendalam. Akibatnya, DPR mendominasi proses penganggaran dan memiliki kekuasaan utama dalam menyetujui anggaran. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam struktur bikameral yang ada, di mana DPD tidak memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan arah kebijakan anggaran, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan representasi dalam proses penganggaran negara.
5.	Komunikasi Politik DPRD dalam Meningkatkan Peran Legislatif di Kota Bandung	Yadi Supriadi	2017	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya komunikasi politik yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung untuk meningkatkan peran legislatif di kota tersebut melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat. Biasanya, komunikasi ini dilakukan melalui elemen-elemen masyarakat tertentu yang mewakili kepentingan berbagai kelompok. DPRD Kota Bandung menerapkan berbagai strategi dalam menyampaikan komunikasi politiknya, yang mencakup tahap perencanaan, penyampaian pesan, dan pengelolaan media komunikasi politik. Namun, dalam pengelolaan pesan komunikasi politik, DPRD Kota Bandung masih menghadapi kendala. Pengelolaan isu-isu politik strategis dinilai masih kurang optimal, dan keberadaan DPRD di media massa serta pemberitaan mengenai DPRD Kota Bandung sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kota

				<p>Bandung belum sepenuhnya memanfaatkan potensi media massa untuk menjangkau publik secara lebih luas. Untuk mengatasi keterbatasan ini, DPRD Kota Bandung telah mulai memanfaatkan media sosial sebagai alternatif untuk menyampaikan pesan yang tidak dapat disampaikan melalui media massa. Penggunaan media sosial diharapkan dapat menjembatani kesenjangan komunikasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislatif, sehingga DPRD dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.</p>
--	--	--	--	--



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini berfokus pada pemaparan situasi atau peristiwa tanpa mencari atau menjelaskan hubungan antar variabel, serta tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis kondisi di lokasi yang telah ditentukan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sumatera Utara menjadi subjek utama, khususnya dalam perannya di bidang pendidikan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Wakil Ketua II DPRD berupaya mendukung pendidikan di provinsi tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari individu yang terlibat langsung dalam kegiatan yang mendukung pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, data sekunder mencakup studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, peraturan perundang-undangan, dan referensi lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai peran dan upaya Wakil Ketua II DPRD dalam sektor pendidikan, serta untuk memahami bagaimana dukungan tersebut diimplementasikan dan diukur dalam konteks lokal.

## 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.5, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, 20231

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai terhitung sejak bulan November 2023 sampai dengan selesai, ada pun jadwal penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
1.	Penyusunan Proposal											
2.	Seminar Proposal											
3.	Perbaikan Proposal											
4.	Pelaksanaan Penelitian											
5.	Seminar Hasil											
6.	Revisi Skripsi											





### 3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara, baik dari individu maupun kelompok. Ini berarti bahwa data primer dikumpulkan langsung dari objek atau subjek penelitian, yang memungkinkan informasi yang diperoleh menjadi lebih autentik dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Data primer umumnya dikumpulkan melalui metode seperti wawancara, observasi, atau survei yang dirancang untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dari beberapa informan yang berperan penting. Informan kunci adalah Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP., yang memberikan wawasan mendalam tentang topik penelitian. Informan utama termasuk Bapak Ali Ibsan Jaya, SH. MH., serta Bapak Dr. Irham Buana Nasution, S.H., M.Hum., yang berkontribusi dengan informasi penting terkait dengan fokus penelitian. Selain itu, Ibu Sufri Hartini, S.Pd. berperan sebagai informan pendukung, memberikan perspektif tambahan yang mendukung data yang dikumpulkan dari informan utama. Dengan melibatkan berbagai informan dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai isu yang diteliti.

### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada dan telah dikumpulkan atau diterbitkan oleh pihak lain sebelumnya (Hasan, 2002: 58). Ini mencakup informasi yang tidak dihasilkan langsung oleh

peneliti, melainkan diambil dari berbagai referensi dan dokumen yang telah tersedia. Data sekunder sering kali digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer yang telah dikumpulkan, sehingga memberikan konteks tambahan dan perspektif yang lebih luas terhadap temuan penelitian.

Sumber data sekunder bisa sangat bervariasi, termasuk bahan pustaka seperti buku dan artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, data sekunder juga dapat mencakup dokumen resmi, statistik yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, dan sumber-sumber lain yang telah disusun dan dipublikasikan. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teori yang kuat, mengonfirmasi atau menilai kembali temuan data primer, dan memahami konteks yang lebih luas dari isu yang sedang diteliti. Dengan mengintegrasikan data sekunder, penelitian menjadi lebih komprehensif dan mendalam, serta memberikan dasar yang lebih solid untuk analisis dan kesimpulan.

### **3.4 Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan untuk memberikan informasi berharga tentang fenomena atau masalah yang diteliti (Sapitri, 2018). Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP., adalah seorang ahli di bidang komunikasi politik dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area. Dengan latar belakang akademis dan pengalamannya, beliau

memberikan wawasan yang mendalam mengenai topik-topik terkait komunikasi politik dan dampaknya terhadap proses legislatif.

Bapak Ali Ibsan Jaya, SH. MH., berfungsi sebagai staf ahli khusus Bapak Irham Buana Nasution dan terlibat langsung dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Irham dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua II DPRD Sumatera Utara. Perannya yang penting dalam mendukung tugas-tugas Bapak Irham memberikan perspektif praktis yang sangat berguna dalam penelitian ini, terutama dalam memahami implementasi kebijakan di lapangan.

Bapak Dr. Irham Buana Nasution, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Ketua II DPRD Sumatera Utara, memainkan peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah. Beliau memberikan informasi langsung mengenai kebijakan dan program yang diterapkan, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada sektor pendidikan di Sumatera Utara.

Selain itu, Ibu Sufri Hartini, S.Pd., yang menjabat sebagai Kepala MDTA Zakhira, sebuah lembaga pendidikan yang pernah dikunjungi oleh Bapak Irham Buana Nasution, memberikan pandangan tentang interaksi antara pejabat legislatif dan institusi pendidikan. Dengan posisi tersebut, beliau memberikan perspektif mengenai dampak kebijakan pendidikan di tingkat lapangan serta pengalaman langsung yang berhubungan dengan implementasi kebijakan oleh pihak legislatif. Keterlibatan semua informan ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh pandangan yang komprehensif dan mendalam mengenai isu-isu yang diteliti, dengan masing-masing informan berkontribusi berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini ada 4 tahap yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik yang diteliti. Jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam untuk dianalisis lebih lanjut (Hasan, 2002: 85). Menurut Lincon dan Guba (1985) dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 127), wawancara memiliki beberapa tujuan penting, seperti mengonstruksi informasi tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian. Selain itu, wawancara juga digunakan untuk merekonstruksi harapan masa depan, memverifikasi data, serta mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari sumber lain.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan kunci untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Informan yang diwawancarai meliputi Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP., seorang ahli komunikasi politik dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area, yang memberikan wawasan berharga tentang teori dan praktik komunikasi politik. Bapak Ali Ibsan Jaya, SH. MH., sebagai staf ahli khusus Bapak Irham Buana Nasution, terlibat langsung dalam kegiatan legislatif dan memberikan perspektif praktis terkait implementasi kebijakan. Bapak Dr. Irham Buana

Nasution, S.H., M.Hum., selaku Wakil Ketua II DPRD Sumatera Utara, memberikan informasi terkait kebijakan dan program pendidikan di daerah. Terakhir, Ibu Sufri Hartini, S.Pd., Kepala MDTA Zakhira, memberikan pandangan mengenai dampak kebijakan pendidikan pada tingkat lapangan. Melalui wawancara dengan para informan ini, peneliti berusaha mengumpulkan data yang komprehensif dan akurat untuk mendukung tujuan penelitian.

## 2. Studi Pustaka

Studi pustaka, menurut Martono (2011: 97), adalah proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai berbagai konsep dan teori yang akan menjadi dasar atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel surat kabar, jurnal ilmiah, dan karya-karya akademik lainnya. Studi pustaka berfungsi sebagai teknik pengumpulan data sekunder yang sangat berguna untuk memberikan konteks, memperdalam pengetahuan, dan menginformasikan metodologi penelitian.

Dalam penerapannya, studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat memahami dengan lebih baik konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dihadapi. Selain itu, studi pustaka juga membantu dalam menilai metodologi yang telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, serta mengidentifikasi fakta-fakta yang mungkin belum diketahui atau belum terungkap secara mendalam. Melalui studi pustaka, peneliti dapat

menemukan landasan teori yang kuat, mengembangkan kerangka konsep, dan memperoleh wawasan tambahan yang dapat mendukung proses analisis dan interpretasi data dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, studi pustaka memainkan peran penting dalam membangun dasar pengetahuan yang kokoh dan menyempurnakan pendekatan metodologis penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mencakup berbagai bentuk media yang dapat memberikan bukti visual dan rekam jejak kegiatan penelitian yang sedang berlangsung. Misalnya, dokumentasi bisa melibatkan pengambilan foto atau video selama proses penelitian untuk menangkap momen-momen penting, aktivitas yang sedang dilakukan, serta kondisi lingkungan yang relevan.

Dengan menggunakan foto dan video, peneliti dapat menyimpan dan menyajikan bukti-bukti yang mendukung hasil penelitian dengan cara yang konkret dan dapat diverifikasi. Foto dapat digunakan untuk menunjukkan situasi atau objek penelitian yang diamati, sementara video memberikan gambaran yang lebih dinamis dan komprehensif tentang proses atau interaksi yang terjadi. Dokumentasi semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendukung validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan tetapi juga sebagai referensi visual yang mempermudah analisis dan interpretasi hasil penelitian. Dengan demikian, dokumentasi merupakan aspek krusial dalam

menjaga integritas dan akurasi hasil penelitian serta memberikan bukti yang jelas dan dapat diakses oleh pihak lain yang mungkin tertarik dengan temuan penelitian.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, seperti yang dijelaskan dalam Prastowo (2012: 36-42). Model ini melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap pertama dalam proses analisis adalah reduksi data, yang melibatkan pemilihan dan penyederhanaan informasi dari data mentah yang diperoleh selama penelitian. Ini mencakup pemusatan perhatian pada elemen-elemen penting dan relevan dari catatan lapangan, sambil mengeliminasi data yang tidak perlu. Proses ini bertujuan untuk mengabstraksi dan mentransformasi data awal menjadi bentuk yang lebih terfokus dan mudah dikelola, sehingga mempermudah peneliti dalam menilai dan mengolah informasi yang ada.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah penyajian data. Pada fase ini, peneliti menyusun informasi yang telah dipilih dan dipusatkan dalam bentuk deskripsi yang terstruktur. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menyajikan informasi secara jelas dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan data



yang telah diolah. Penyajian data memungkinkan peneliti untuk melihat pola-pola, hubungan, dan tren yang muncul dari data yang telah disaring.

### 3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi (*Conclusion/Verification*)

Tahap akhir dalam proses analisis adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis, dengan mencari makna di balik gejala-gejala yang ditemukan di lapangan. Peneliti mencatat keteraturan, konfigurasi, dan alur kausalitas yang mungkin ada dalam data. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan memeriksa keandalan temuan dan mengevaluasi proporsi fenomena yang ada.

### 3.7 Keabsahan Data

Dalam pengujian kredibilitas data, triangulasi merupakan metode penting untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan penelitian. Triangulasi didefinisikan sebagai proses verifikasi data dengan menggunakan berbagai sumber informasi atau metode, yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Terdapat dua jenis triangulasi yang digunakan, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teori.

#### 1. Triangulasi Sumber

Teknik yang melibatkan pengujian data dengan menggunakan berbagai sumber atau informan sebelum mengadopsinya sebagai temuan yang sah. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber atau informan yang berbeda, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipercaya

(Sugiyono, 2017 dalam Afansyur et al., 2020). Dengan memeriksa data dari beberapa perspektif, peneliti dapat memvalidasi konsistensi dan keandalan informasi yang dikumpulkan.

## 2. Triangulasi Teori

Berfokus pada membandingkan hasil akhir penelitian dengan berbagai perspektif teoretis yang relevan. Setelah memperoleh informasi atau rumusan hasil penelitian, peneliti membandingkannya dengan teori-teori yang ada untuk menghindari bias individual dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Triangulasi teori memungkinkan peneliti untuk menggali pengetahuan teoretis yang lebih dalam mengenai hasil analisis data, dan dengan demikian, meningkatkan kedalaman dan keakuratan pemahaman (Sukmadinata, 2011).

Dalam penelitian ini, triangulasi teori dipilih karena beberapa alasan penting. Pertama, dengan memadukan berbagai teori komunikasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang proses komunikasi yang dilakukan oleh Irham Buana Nasution. Setiap teori menawarkan wawasan berbeda mengenai bagaimana komunikasi berlangsung dan bagaimana aspirasi masyarakat bisa diserap secara efektif. Kedua, pendekatan ini membantu meminimalisir bias yang mungkin muncul jika hanya satu teori yang diterapkan, karena berbagai perspektif teoretis memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap data yang ada. Ketiga, triangulasi teori memungkinkan peneliti untuk menguji konsistensi temuan melalui berbagai lensa teoretis, yang pada gilirannya meningkatkan keandalan dan validitas hasil penelitian.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bagaimana peran dan tanggung jawab Bapak Irham Buana Nasution sebagai Wakil Ketua II DPRD Sumatera Utara dalam bidang pendidikan, di mana beliau berperan aktif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara melalui berbagai pendekatan strategis dan interaksi langsung dengan pemangku kepentingan.

##### **1. Komunikasi Irham Buana Nasution dalam Mengupayakan Penyerapan Aspirasi di Bidang Pendidikan di Sumatera Utara**

Komunikasi yang diterapkan oleh Irham Buana Nasution mencakup konsistensi dalam menyampaikan aspirasi pendidikan dengan mengadakan pertemuan rutin, mengutamakan diskusi langsung melalui pertemuan tatap muka dan kunjungan lapangan, serta mengadakan diskusi terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan suasana kondusif dalam menyampaikan pandangan, pengalaman, dan keluhan. Secara umum, beliau menggunakan komunikasi yang terbuka, inklusif, dan tegas dalam interaksi terkait pendidikan di Sumatera Utara.

##### **2. Hambatan yang Dihadapi Irham Buana Nasution dalam Mengupayakan Penyerapan Aspirasi di Bidang Pendidikan di Sumatera Utara**

Berbagai hambatan yang dihadapi Irham Buana Nasution dalam menjalankan tugasnya, seperti keinginan masyarakat yang beragam dan kompleks, keterbatasan

sumber daya dan anggaran yang mengakibatkan hanya sebagian aspirasi yang dapat direalisasikan, serta keterbatasan kewenangan legislatif yang membuat banyak keputusan bergantung pada persetujuan eksekutif.

## 5.2 Saran

1. Melakukan analisis mendalam terhadap peran dan kontribusi pejabat publik lainnya di tingkat lokal, provinsi, atau nasional dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah diluncurkan serta dampaknya.
2. Melakukan studi perbandingan antar wilayah atau provinsi untuk memahami variasi dalam pendekatan, kebijakan, dan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai konteks lokal.
3. Mengkaji pengaruh kebijakan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, terhadap pengembangan sistem pendidikan, termasuk analisis terhadap kebijakan yang diusulkan, dilaksanakan, atau dibatalkan oleh pejabat publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Altman, I. & Taylor, D., 1973. *Social penetration: The development of interpersonal relationships*. New York: Holt.
- Anam, S. & Anwar, K., 2020. Efektivitas Fngsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik. *Reformasi*, 10(1), pp. 61-69.
- As'ari, A. d. H., 2016. Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), pp. 23-32.
- Asiah, D., 2023. Tanggung Jawab Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, 1(1), pp. 68-75.
- Aw, S., 2011. *Komunikasi Interpersonal*. 1 ed. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azahra, A. & Lubis, F. A., 2021. Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), pp. 8234-8245.
- DeVito, 1992. *The Interpersonal Communication Book*. 6th ed ed. New York: Harper Collins.
- Gordon, G. N., 2024. *Britannica - Communication*. [Online] Available at: <https://www.britannica.com/topic/communication>. [Accessed 1 Juni 2024].
- Haryati, D., 2010. Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Kajian*, 15(3), pp. 523-550.
- Herlin, A., 2022. Penerapan Tugas Utama Dan Fungsi Komisi E DPRD Sumut Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [(JIMSIPOL)*, 2(6), pp. 564-575.

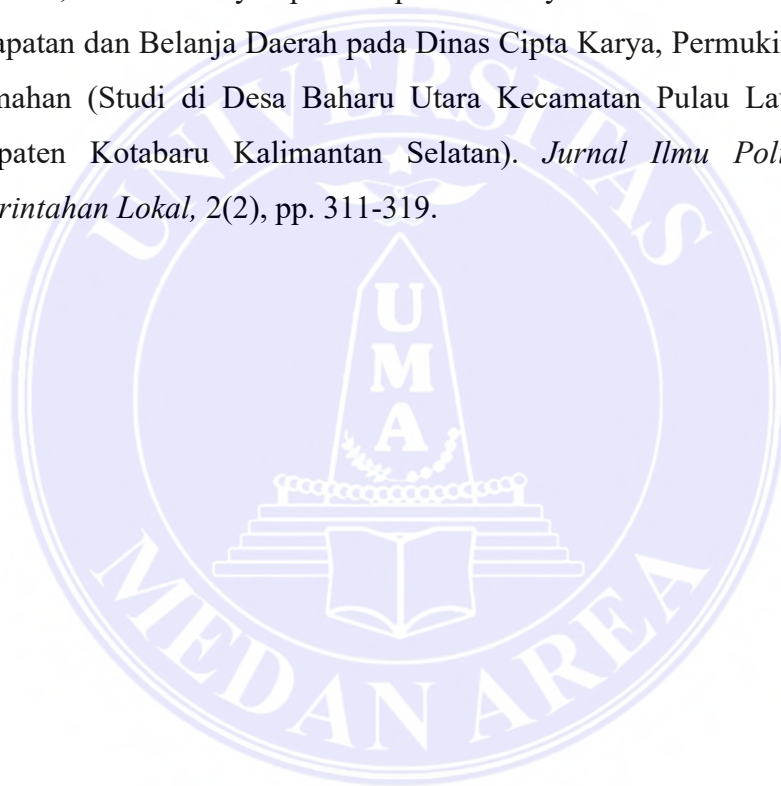
- Isril, I., Febrina, R., Harirah, Z. & Hadi, S., 2022. *Pemanfaatan Saluran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru*. Pekanbaru, Prosiding Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .
- Leksono, T. M., Suhartono, S., Hufron & hadi, S., 2022. The Urgency of Regulating the Absorption of Constituent Aspirations The Regional House of Representative for Preparation Budget Regional Income and Expenditure. *Technium Social Sciences Journal*, 31(2), pp. 296-310.
- Mulyana, D., 2019. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ntara, Caroline & Evans, A. C., 2023. *What is Communication? | Concept & Importance*. [Online] Available at: <https://study.com/academy/lesson/what-is-communication-definition-importance.html> [Accessed 1 Juni 2024].
- Nurdin, A., 2014. *Teori Komunikasi Interpersonal: Disertai Contoh Fenomena Praktis*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Rahmah, D. C. & Marliyah, 2021. Peran DPRD terhadap Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dalam Aspek Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), pp. 8712-8722.
- Rahmatillah, A. N. & Keban, Y. T., 2007. *Persepsi anggota legislatif terhadap rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan*, Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Gajah Mada.
- Sari, W. et al., 2024. Pengaruh Peran Komisi A, B, dan E DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* , 5(1).

Sinaga, J. et al., 2023. Peran Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap Kinerja. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 1(4), pp. 154-163.

Sukmadinata, N. S., 1997. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Zahra, F., Sukoco, I., Auliana, L. & Barkah, C., 2022. Komunikasi Efektif Dalam Membangun Strategi Customer Relationship Management. *Gandiwa Jurnal Komunikasi*, 2(1).

Zuhriansyah, M., 2013. Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan (Studi di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 2(2), pp. 311-319.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Panduan Wawancara

#### 1. Komunikasi Irham Buana Nasution

- a. Bagaimana Bapak Irham Buana Nasution menyampaikan pendapat dan aspirasi secara langsung kepada pemangku kepentingan di bidang pendidikan?
- b. Dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan pendidikan, bagaimana Bapak menyampaikan kritik atau masukan secara langsung?
- c. Apakah Bapak Irham Buana Nasution pernah menggunakan pendekatan tidak langsung dalam menyampaikan pesan terkait pendidikan?
- d. Dalam situasi apa Bapak menggunakan pendekatan tidak langsung untuk menyampaikan pesan penting terkait pendidikan?
- e. Bagaimana Bapak Irham Buana Nasution menunjukkan ketegasan dalam menyampaikan aspirasi dan kebijakan di bidang Pendidikan?
- f. Bagaimana Bapak Irham menangani situasi di mana ia perlu mendengarkan lebih banyak daripada berbicara terkait masalah pendidikan?
- g. Apakah ada mekanisme untuk mengevaluasi dan mencatat masukan dari masyarakat secara pasif? Bisa dijelaskan?
- h. Apakah Bapak Irham Buana Nasution pernah menunjukkan gaya komunikasi yang agresif dalam menyampaikan pesan terkait pendidikan? Jika ya, dalam situasi apa dan mengapa?



- i. Bagaimana Bapak mengekspresikan urgensi suatu masalah pendidikan tanpa menimbulkan konflik?

## 2. Hambatan

- a. Bagaimana pandangan Bapak Ali Ibsan Jaya dalam melihat tanggapan dan langkah yang dilakukan Bapak Irham Buana Nasution dalam menghadapi hambatan terkait menampung aspirasi dalam bidang pendidikan di Sumatera Utara?
- b. Bagaimana kendala dan hambatan yang Bapak Irham Buana Nasution jumpai selama melakukan penyerapan aspirasi terkait pendidikan di Sumatera Utara?
- c. Bagaimana langkah konkrit Bapak Irham Buana Nasution dalam menghadapi hambatan yang beliau hadapi dalam menampung aspirasi masyarakat terkait bidang pendidikan?

## Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan



Dokumentasi Wawancara dengan  
Bapak Ali Ibsan Jaya, SH. MH



Dokumen Wawancara dengan  
Bapak Dr. Irham Buana Nasution, SH.  
M.Hum




Dokumentasi Wawancara dengan  
Dr. Walid Musthafa Sembiring,  
S.Sos, M.IP



Dokumentasi Kegiatan Irham Buana  
Nasution di MDTA Zakhira Medan

### Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Kampus I Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122 Website: <a href="http://www.uma.ac.id">www.uma.ac.id</a> E-Mail: <a href="mailto:univ_medanarea@uma.ac.id">univ_medanarea@uma.ac.id</a>
Nomor : 1627 /FIS.3/01.10/VI/2024	Medan, 19 Juni 2024
Lampiran : -	
H a l : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset	
Kepada Yth. <b>Sekretariat Dewan DPRD Sumatera Utara</b> Jl. Imam Bonjol No.5, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231	
Dengan hormat, Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Bethari Safin Siregar	
NIM : 208530154	
Program Studi : Ilmu Komunikasi	
Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Sekretariat Dewan DPRD Sumatera Utara untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :	
<i>"komunikasi irham buana nasution selaku wakil ketua ii dprd sumatera utara dalam bidang pendidikan di sumatera utara"</i>	
Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.	
Demikian surat ini kami ajukan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
{Dekan  <b>Dr. Walid Musthafa S, S.Sos., M.I.P.</b>	
Tembusan: 1. Ka. Prodi Ilmu Komunikasi 2. Mahasiswa ybs 3. Arsip	
	

## Lampiran 4 Surat Izin Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Imam Bonjol No. 5, Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4156000, Faksimile (061) 4519178  
Pos-el [Humas.dprdsulut@gmail.com](mailto:Humas.dprdsulut@gmail.com), Laman [dprd-sumutprov.go.id](http://dprd-sumutprov.go.id)

Medan, 15 Juni 2024

Nomor : 400/ 2024 /Skr DPRD/VI/2024  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Melaksanakan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area  
Di -

Medan

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor: 1624/FIS.3/01/10/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024 dengan ini memberikan **Izin** Kepada Mahasiswa/I tersebut dibawah ini:

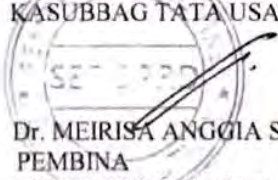
Nama : Bethari Safin Siregar  
NIM : 208530154  
Prog. Studi : Ilmu Komunikasi

Untuk Melaksanakan Penelitian di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan mematuhi segala peraturan yang berlaku sebagai berikut.

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD-SU
2. Mengenakan pakaian yang sopan serta selalu menjaga ketertiban dilingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara
3. Melapor Kepada Kepala Bagian Umum Cq. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian apabila telah selesai melaksanakan Magang

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

  
Dr. MEIRISA ANGGIA SIREGAR, S.Sos. M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19840526 201001 2 015